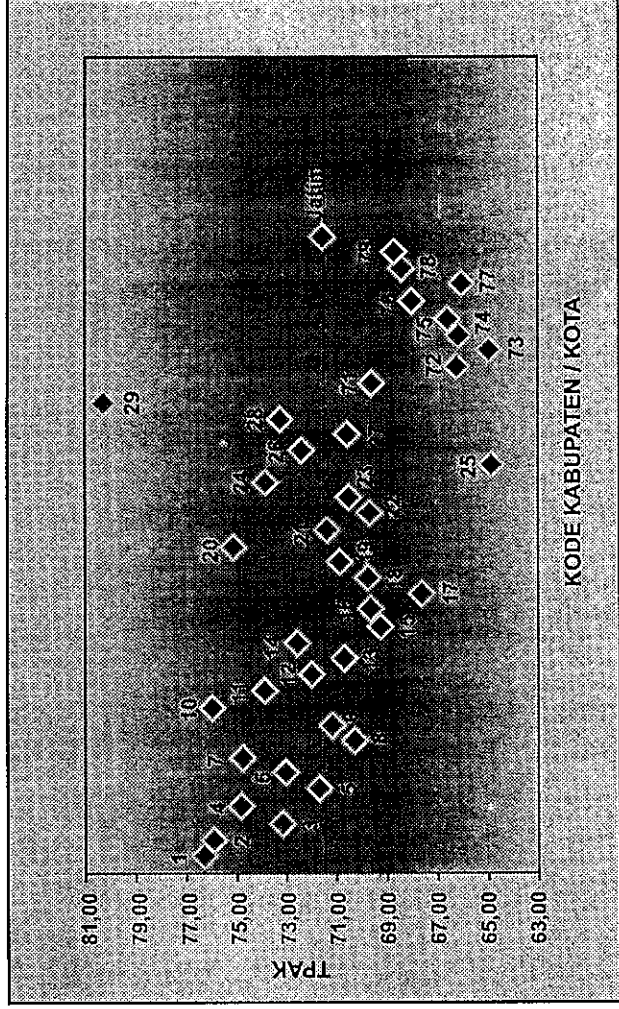


LAPORAN EKSEKUTIF KEADAAN ANGKATAN KERJA DI JAWA TIMUR 2004-2005



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI JAWA TIMUR**

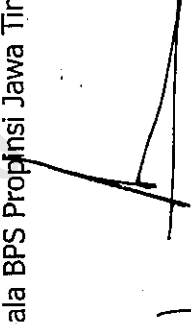
KATA PENGANTAR

Laporan eksekutif tentang Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur Tahun 2004-2005 merupakan salah satu publikasi tentang ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS Jawa Timur. Laporan ini memuat ulasan ringkas dan indikator ketenagakerjaan yang mengacu pada konsep *Labor Force* yang telah direkomendasi oleh *International Labor Organization* (ILO).

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semester II dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2004-2005. Diharapkan informasi mengenai ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini dapat digunakan untuk memantau dinamika ketenagakerjaan di Jawa Timur dan sekaligus untuk dasar perencanaan serta evaluasi pembangunan sosial ekonomi.

Kepada semua pihak yang telah membantu terealisasinya publikasi ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan kritik untuk perbaikan publikasi ini ke depan kami harapkan.

Surabaya, September 2006
Kepala BPS Propinsi Jawa Timur



DJAMAL, SE, M.Sc.
NIP. 340 004 373

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sumber Data	2
BAB II PENDUDUK USIA KERJA	3
2.1 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan.....	3
2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	5
BAB III STRUKTUR PENDUDUK YANG BEKERJA	8
3.1 Struktur Tenaga Kerja menurut Sektor	8
3.2 Struktur Tenaga Kerja menurut Status Pekerjaan.....	12
3.3 Struktur Tenaga Kerja menurut Jumlah Jam Kerja.....	14
BAB IV JUMLAH PENGANGGURAN	17
4.1 Jumlah Pengangguran Terbuka	17
4.2 Jumlah Pengangguran menurut Pendidikan	18
LAMPIRAN	19

DAFTAR ISTILAH

- TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
TKK : Tingkat Kesempatan Kerja
Informal : Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar, dan pekerja bebas (pertanian/non pertanian)
- Pengangguran : Penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan sedang mencari kerja, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja selama seminggu yang lalu.
Sebelumnya, pengangguran hanya meliputi penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan.

Kode Kabupaten/Kota:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 = Kab. Pacitan | 20 = Kab. Magetan |
| 2 = Kab. Ponorogo | 21 = Kab. Ngawi |
| 3 = Kab. Trenggalek | 22 = Kab. Bojonegoro |
| 4 = Kab. Tulungagung | 23 = Kab. Tuban |
| 5 = Kab. Blitar | 24 = Kab. Lamongan |
| 6 = Kab. Kediri | 25 = Kab. Gresik |
| 7 = Kab. Malang | 26 = Kab. Bangkalan |
| 8 = Kab. Lumajang | 27 = Kab. Sampang |
| 9 = Kab. Jember | 28 = Kab. Pamekasan |
| 10 = Kab. Banyuwangi | 29 = Kab. Sumenep |
| 11 = Kab. Bondowoso | 71 = Kota Kediri |
| 12 = Kab. Situbondo | 72 = Kota Blitar |
| 13 = Kab. Probolinggo | 73 = Kota Probolinggo |
| 14 = Kab. Pasuruan | 74 = Kota Pasuruan |
| 15 = Kab. Sidoarjo | 75 = Kota Malāng |
| 16 = Kab. Mojokerto | 76 = Kota Mojokerto |
| 17 = Kab. Jombang | 77 = Kota Madiun |
| 18 = Kab. Nganjuk | 78 = Kota Surabaya |
| 19 = Kab. Madiun | 79 = Kota Batu |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan wilayah, khususnya yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan itu sendiri. Ada dua manfaat utama dari data ketenagakerjaan, yaitu dapat menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut wilayah dan sektor. Hal ini tentunya berguna bagi pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang tersedia dan daya tarik bagi investor dalam melakukan strategi investasi

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Timur tidak berbasis investasi sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja yang memadai. Sementara dari sisi pertumbuhan angkatan kerja, kondisinya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut terjadi, **Pertama** pertumbuhan penduduk di Jawa Timur cenderung tinggi, sehingga melebihi pertumbuhan investasi. **Kedua**, secara demografis profil penduduk Jawa Timur dapat diklasifikasikan sebagai penduduk muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. **Ketiga**, struktur industri cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks.

Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur tahun 2005 mencapai 19,33 juta. Sekitar 58,75 persen dari angkatan kerja tersebut masih berpendidikan rendah (SD ke bawah). Dari sisi pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari angka rata-rata angka elastisitas, sebesar 0,22 atau lebih kecil dari angka nasional sebesar 0,23, mencerminkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

Secara keseluruhan publikasi ini akan menyajikan data ketenagakerjaan yang meliputi jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja dan tenaga kerja, menurut karakteristik umur, jenis kelamin dan pendidikan. Serta indikator lainnya seperti angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari hasil pengumpulan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semester II dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004-2005.

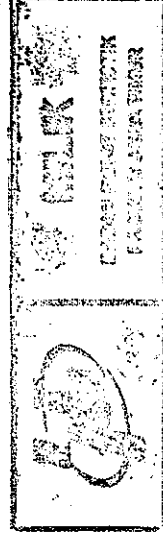
1.2. Tujuan

Tujuan penulisan keadaan angkatan kerja di Jawa Timur dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas tentang kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada tahun 2004-2005 berdasarkan hasil Sakernas dan Susenas.

1.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan keadaan angkatan kerja di Jawa Timur tahun 2004-2005 berasal dari hasil pengumpulan data melalui Sakernas yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia setiap tahun. Ukuran sampel Sakernas untuk Propinsi Jawa Timur setiap tahunnya sebesar 8.832 rumahtangga, sedangkan ukuran sampel Susenas sebesar 29.952 rumahtangga yang tersebar di semua kabupaten/kota. Dari data Sakernas dapat diketahui kondisi ketenagakerjaan secara rinci untuk lingkup propinsi, sedangkan sebaran data per kab/kota dapat diperoleh dari data Susenas.

Pengumpulan data pada rumahtangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antar petugas survei dengan responden. Petugas survei terdiri dari staf BPS kabupaten/kota, mantri statistik/koordinator statistik kecamatan (KSK), serta mitra statistik. Sebelum melaksanakan pendataan, petugas survei terlebih dahulu diberikan pelatihan untuk memperoleh bekal pemahaman tentang konsep, definisi, serta tata cara melaksanakan survei.



Dari data ketenagakerjaan yang dikumpulkan BPS pada tahun 2005, di Jawa Timur terdapat 27,038 juta jiwa penduduk usia kerja. Sebagian besar dari penduduk usia kerja yang ada merupakan angkatan kerja atau aktif dalam kegiatan ekonomi. Dibandingkan tahun 2004, persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja mengalami peningkatan sebesar 2,92 persen poin, sebaliknya persentase bukan angkatan kerja mengalami penurunan. Dampak yang nyata dari kenaikan jumlah angkatan kerja adalah semakin meningkatnya angka pengangguran di Jawa Timur yaitu dari 7,69 persen menjadi 8,51 persen.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, kegiatan terbanyak yang dilakukan penduduk laki-laki adalah aktif dalam kegiatan ekonomi khususnya bekerja, sedangkan persentase terbesar penduduk perempuan adalah bekerja dan mengurus rumah-tangga. Tabel 2.1 juga memperlihatkan bahwa dalam hal pendidikan (kegiatan sekolah), penduduk laki-laki nampaknya mempunyai kesempatan lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin, 2004-2005

Kegiatan (1)	2004		2005	
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Laki-laki (5)	Perempuan (6)
Angkatan Kerja	86,99	50,96	88,89	54,38
- Bekerja	81,43	45,96	82,47	48,63
- Pengangguran	5,56	5,00	6,42	5,76
Bukan Angkatan Kerja	13,01	49,04	11,11	45,62
- Sekolah	6,51	6,34	7,78	7,05
- Mengurus Rumah tangga	1,01	37,26	0,43	34,53
- Lainnya	5,49	5,44	2,90	4,04
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

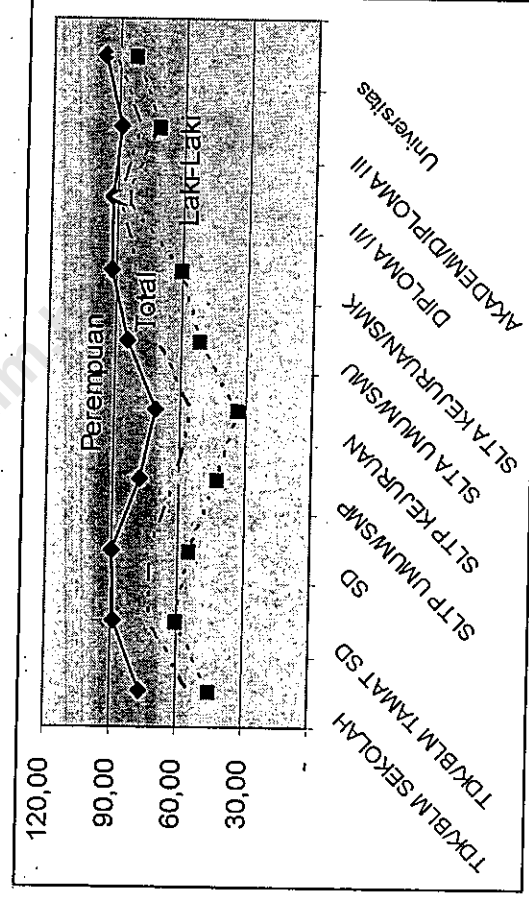
Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas 2004 – 2005 (data diolah)

Persentase angkatan kerja menurut kelompok umur tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase terbesar berada pada kelompok umur 25 – 54 tahun yaitu sebesar 59,26 persen. Sementara pada kelompok usia 15 – 24 tahun sebesar 22,36 persen. Masuknya penduduk usia 15 -24 tahun ke dalam kelompok kerja diharapkan tidak semakin besar, mengingat kelompok usia tersebut, seharusnya masih terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Sebagian besar angkatan kerja yang berumur 15 – 24 tahun hanya mengenyam pendidikan SLTP yaitu sebesar 42,01 persen.

Karakteristik lain yang dapat diamati dari variasi TPAK adalah menurut variabel umur. Seperti halnya tahun 2004, pola TPAK Di Jawa Timur menurut kelompok umur pada tahun 2005 tidak mengalami perubahan yang berarti. TPAK mencapai titik optimal pada kelompok usia 45-49 tahun yaitu dengan besaran 80,44. Pada kelompok umur di atas 49 tahun, TPAK mulai mengalami penurunan hingga mencapai titik minimum yaitu sebesar 51,76 yang terjadi pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Tingginya TPAK pada kelompok umur 45-49 tahun mencerminkan bahwa penduduk pada kelompok umur tersebut mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Pola TPAK menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 2.3.

Secara teori tingkat pendidikan yang ditamatkan akan mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan maka TPAK cenderung akan meningkat. Pola TPAK menurut tingkat pendidikan di Jawa Timur tahun 2005 mulai meningkat pada kelompok pendidikan SLTA, sedangkan pada tingkat pendidikan di bawah SLTA polanya berfluktuasi.

Gambar 2.4. TPAK menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Jawa Timur Tahun 2005



Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas 2005 (data diolah)

BAB III

STRUKTUR PENDUDUK YANG BEKERJA

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur, selain dengan mengamati struktur angkatan kerja, perlu juga dilakukan pengamatan terhadap struktur penduduk yang bekerja. Khusus untuk tahun 2005, nampaknya struktur tenaga kerja mengalami perubahan baik dari sisi jumlah maupun sebarannya. Perubahan ini diduga karena adanya dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2005, yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat dan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya.

Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur tidak diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk yang terserap dalam lapangan pekerjaan. Dengan demikian Angka Beban Tanggungan Nyata (ABT) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap total penduduk cenderung semakin besar. Fenomena lain yang terjadi adalah daya serap pekerja yang terbesar berada pada kegiatan informal atau kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional dan subsisten, karena umumnya rata-rata pendidikan tenaga kerja masih relatif rendah.

3.1. Struktur Tenaga Kerja menurut Sektor

Menurut konsep *Labor Force*, kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi orang tua/saudara/orang lain.

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada tahun 2005 mencapai 17,7 juta atau 91,49 persen terhadap jumlah angkatan kerja yang ada, angka tersebut dalam ketenagakerjaan dikenal sebagai Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Dibanding data angka TKK tahun 2004 sebesar 92,31, artinya terjadi penurunan sebesar 0,82. Penurunan TKK diduga karena adanya pengaruh kondisi ekonomi tahun 2005 yang tidak sebaik kondisi tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,69 persen atau lebih kecil dibandingkan tahun 2004 yaitu sebesar 5,83 persen.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya tenaga kerja yang terserap dalam sektor ekonomi yang disebabkan karena pertumbuhan ekonomi adalah elastisitas. Angka elastisitas dapat juga digunakan untuk mengetahui produktifitas tenaga kerja yang terserap dalam sektor ekonomi (BPS,2003). Berdasarkan hasil pengolahan data tenagakerja dan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir (2001 – 2005), rata-rata angka elastisitas di Jawa Timur sebesar 0,22 atau sedikit lebih kecil dari angka nasional sebesar 0,23. Besaran angka elastisitas tersebut mencerminkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

Tabel 3.1. Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Sektor Tahun 2001 – 2005

Sektor	Rata2 Pert. KK 2001 - 2005	Rata2 Pert. Ekonomi 2001 - 2005	Elastisitas 2001 – 2005
Pertanian	0,87	2,11	0,41
Pertambangan	12,17	3,76	3,23
Industri Pengolahan	1,49	3,19	0,47
Listrik, Gas dan Air	4,02	9,20	0,44
Bangunan	5,12	1,84	2,79
Perdagangan	0,04	8,54	0,01
Angkutan	-0,52	6,52	(0,08)
Keuangan	5,63	5,57	1,01
Jasa	2,84	3,62	0,78
Jumlah	1,05	4,77	0,22

Sumber : BPS Jawa Timur , Sakernas 2001 – 2005 dan PDRB 2001 - 2005 (data diolah)

Jika diperhatikan per sektor ekonomi, maka elastisitas kesempatan kerja cukup bervariasi. Untuk sektor keuangan/perbankan dan jasa menunjukkan padat karya, dengan angka elastisitas mendekati 1: Sektor listrik, gas dan air serta pertambangan dan penggalian, elastisitasnya lebih dari satu. Angka elastisitas > 1 menunjukkan terjadinya penurunan produktifitas pada sektor tersebut. Selanjutnya pada sektor angkutan dan telekomunikasi menunjukkan angka negatif, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai efisiensi penggunaan tenaga kerja atau semakin padat modal.

Menurut Nasution (2005): “untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta meningkatkan basis pajak maupun

ekspor maka diperlukan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 – 7 persen per tahun. Sementara angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur per tahun hingga tahun 2005 masih di bawah 6 persen. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir ini lebih disebabkan karena konsumsi dan sektor informal. Padahal untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang stabil adalah dengan memperbaiki iklim investasi (Basri,2006). Selama lima tahun terakhir (2001 – 2005), besaran investasi cenderung menurun yaitu dari 20,42 persen menjadi 17,62 persen dari PDRB Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2005)².

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sebagian besar masih pekerja terserap pada sektor pertanian dan meningkat selama tahun 2004 – 2005. Nampaknya sektor pertanian mampu bertahan meskipun pada kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian merupakan pekerja keluarga atau pekerja yang turun temurun, dan tidak memerlukan spesifikasi pendidikan/ketrampilan khusus. Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sector pertanian menjadi kurang menguntungkan bagi pekerjanya atau penduduk.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan di Jawa Timur, 2004-2005

Lapangan Pekerjaan	2004		2005			
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)	Laki-Laki (5)	Perempuan (6)	Jumlah (7)
Pertanian	44,84	42,86	44,11	47,81	43,18	46,08
Industri Pengolahan	11,74	15,24	13,04	10,99	16,71	13,13
Perdagangan	15,88	27,88	20,33	14,79	26,16	19,05
Jasa Kemasyarakatan	9,26	12,35	10,40	9,09	11,95	10,16
Lainnya *)	18,28	1,68	12,13	17,32	2,00	11,58
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10.931.733	6.443.222	17.374.955	11.102.082	6.644.320	17.746.402

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas 2004 – 2005 (data diolah)

Catatan: *) Bangunan; Keuangan; Pertambangan; Listrik, Gas, dan Air

Selain sektor pertanian, peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2005 juga terjadi pada sektor industri meskipun relatif kecil dibandingkan kenaikan pada sektor pertanian. Namun perlu diwaspadai bahwa penyerapan tenaga kerja pada sector tersebut relatif rentan terhadap perubahan ekonomi wilayah. Khususnya pasca kenaikan harga BBM, sebagian besar perusahaan di sector industri terancam “gulung tikar” karena tidak mampu memenuhi biaya produksi yang semakin tinggi.

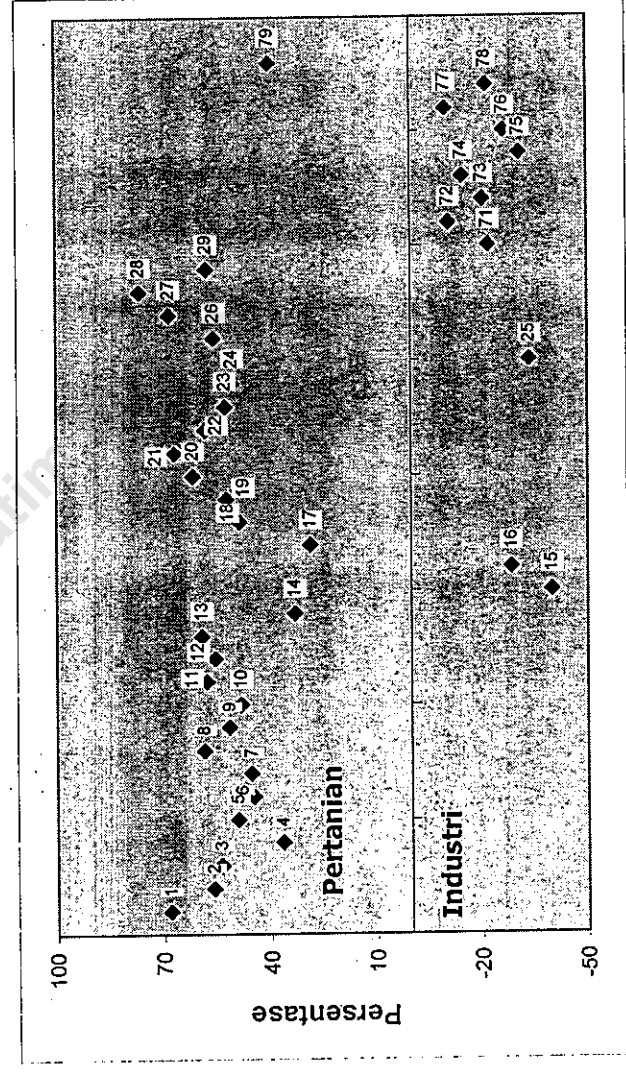
² BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Tahun 2005, Surabaya, 2006.

Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan.

Seperti halnya kondisi tahun 2004, penyerapan tenaga kerja perempuan pada sektor Industri, Perdagangan dan Jasa lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini diduga karena tenaga kerja perempuan cenderung lebih "telaten" dan tidak banyak "tuntutan" pada perusahaan. Kedua faktor tersebut nampaknya menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk memilih tenaga kerja perempuan, khususnya untuk jenis pekerjaan yang sifatnya memerlukan ketelitian, keindahan dan pelayanan pada konsumen.

Kondisi tenaga kerja menurut tingkat pendidikan dapat mencerminkan tingkat produktivitas tenaga kerja, yang secara tidak langsung diharapkan dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Berdasarkan tingkat pendidikannya, persentase terbesar tenaga kerja pada setiap sektor adalah berpendidikan rendah atau SD ke bawah, kecuali pada sector listrik, gas dan air serta sektor keuangan/perbankan.

Gambar 3.1. Persentase Tenaga Kerja Terbesar menurut Sektor Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005



Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah dari Sakernas dan Susenas 2005)
Catatan: Kode Kabupaten/Kota ada pada Daftar Istilah

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2005 penyerapan terbesar pekerja di sektor Pertanian di Jawa Timur umumnya terjadi di daerah kabupaten, kecuali pada Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik dengan penyerapan terbesar

pekerja pada sektor industri. Selanjutnya pada daerah kota, penyerapan terbesar tenaga kerja di sektor industri, kecuali Kota Batu masih didominasi oleh sektor pertanian.

3.2. Struktur Tenaga Kerja menurut Status Pekerjaan

Analisis ketenagakerjaan akan lebih menarik apabila struktur tenaga kerja dikaji menurut status pekerjaan. Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang di dalam pekerjaan yang dilakukannya. Data mengenai penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan di Jawa Timur tahun 2004-2005 dapat dilihat pada tabel 3.2. Sebagaimana tahun sebelumnya, secara keseluruhan persentase penduduk yang bekerja di Jawa Timur adalah berstatus buruh/karyawan. Besarnya jumlah buruh di Jawa Timur, menuntut perhatian yang khusus dari pemerintah setempat. Hal ini disebabkan karena antara buruh dan pengusaha seringkali tidak ada kesepakatan dalam hal perlindungan buruh maupun upah. Meskipun mekanisme tersebut sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2004-2005

Status Pekerjaan	2004			2005		
	Laki-laki (2)	Peremp. (3)	Jumlah (4)	Laki-laki (5)	Peremp. (6)	Jumlah (7)
Berusaha sendiri	17,03	17,25	17,12	15,22	13,99	14,76
Berusaha dibantu buruh tdk tetap	28,94	12,71	22,92	30,11	13,04	23,72
Berusaha dibantu buruh tetap	4,79	1,28	3,49	3,92	0,93	2,80
Buruh/karyawan/pe gawai	26,58	22,52	25,08	25,46	24,85	25,23
Pekerja bebas per-tanian	7,14	7,11	7,13	9,89	9,41	9,71
Pekerja bebas non per-tanian	5,99	1,16	4,20	6,15	2,26	4,69
Pekerja Tidak dibayar	9,52	37,97	20,07	9,26	35,52	19,09
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah	10.931.733	6.443.222	17.374.955	11.102.082	6.644.320	17.746.402

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas 2004 – 2005 (data diolah)

Informasi mengenai status pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi besarnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal dan informal. Konsep yang digunakan BPS tentang pekerja formal adalah pekerja yang berstatus buruh dan berusaha sendiri dibantu buruh tetap. Sedangkan pekerja

informal adalah mereka yang statusnya berusaha sendiri dan pekerja bebas (baik pada sektor pertanian maupun non pertanian). Menurut persepsi masyarakat awam kelompok pertama umumnya adalah mereka yang bekerja di perkantoran. Sementara itu kelompok pekerja informal umumnya adalah mereka yang bekerja tidak menentu, gaji yang diperoleh kecil dan jangka waktu penerimaan tidak tentu, lingkungan dan kondisi kerja jelek, di pinggir kota, atau kalau ada di pusat kota mereka bekerja di kaki lima yang sering dikejar tim ketertiban umum.

Dari Tabel 3.2. di atas, jumlah tenaga kerja pada kegiatan formal jauh lebih kecil dibandingkan informal yaitu sekitar 28,03 persen (4,97 juta orang) berbanding 71,97 persen (12,78 juta orang). Masih besarnya persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal, menunjukkan bahwa penduduk berupaya menciptakan pekerjaan sendiri untuk bertahan hidup, mengingat semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan yang formal. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kegiatan pada sektor informal harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, dalam rangka mendorong pengembangannya. Mengingat sektor ini umumnya merupakan kegiatan UKM (usaha kecil dan menengah) yang rentan terhadap pengaruh fluktuasi ekonomi dan politik. Apabila sektor informal mendapatkan perhatian yang penuh dan berkesinambungan dari semua pihak, maka kegiatan tersebut secara perlahan dan pasti akan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran (Adioetomo, 2003).

Tabel 3.3. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Tahun 2005

Status Pekerjaan	SD Ke	SLTP	SLTA	Dip/Akd	Univ	Jumlah
	Bawah					
Berusaha	71,67	16,12	10,63	0,28	1,30	100,00
Buruh	29,56	20,05	34,18	5,02	11,19	100,00
Pekerja Bebas	94,08	4,61	1,22	0,02	0,06	100,00
Pekerja keluarga	69,33	21,75	8,24	0,11	0,57	100,00
Jumlah	72,64	13,05	10,83	1,00	2,49	100,00

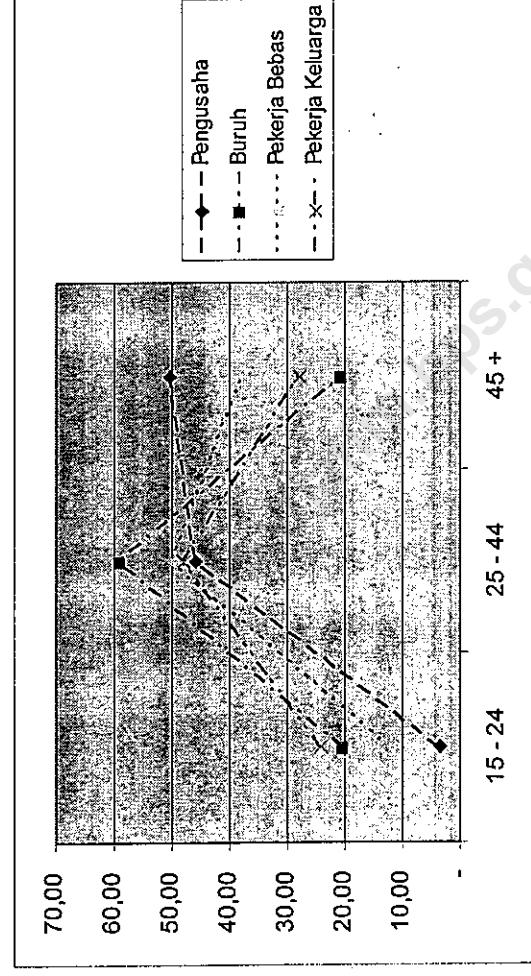
Sumber : BPS Jawa Timur, Sakernas 2004-2005 (data diolah)

Selanjutnya data mengenai status pekerjaan menurut pendidikan bertujuan untuk mengetahui kemandirian pekerja (*entrepreneurship*). Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga dapat memperkecil tingkat pengangguran. Dari Tabel 3.3. di atas, nampaknya kondisi yang diharapkan belum

menunjukkan hasil yang memuaskan. Persentase tenaga kerja berpendidikan SLTA ke atas yang berstatus pengusaha masih relatif kecil yaitu 1,58 persen.

Jika diamati menurut kelompok umur, masing-masing status pekerjaan mempunyai pola yang berbeda, khususnya antara kelompok pengusaha dan bukan pengusaha (buruh dibayar, pekerja bebas dan pekerja tdk dibayar). Pada kelompok pertama, persentase pengusaha semakin meningkat pada kelompok usia tua (45 tahun ke atas). Sebaliknya untuk kelompok bukan pengusaha, persentase tertinggi terdapat pada kelompok usia 25 – 44 tahun atau usia prima (*prime age*).

Gambar 3.2. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Kelompok Umur di Jawa Timur Tahun 2005



3.3. Struktur Tenaga Kerja menurut Jumlah Jam Kerja

Struktur penduduk yang bekerja di Jawa Timur menurut jam kerja dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat tingkat produktivitas pekerja di Jawa Timur. Diharapkan semakin besar persentase tenaga kerja yang bekerja di atas jam kerja normal (35 jam ke atas dalam seminggu), maka semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja baik dari sisi output maupun pendapatan pekerja. Secara umum, tenaga kerja menurut jumlah jam kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) kurang dari 35 jam dalam seminggu yang sering dikenal sebagai pekerja tidak penuh; 2) lebih dari 35 jam kerja dalam seminggu atau disebut sebagai pekerja penuh.

Pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja yang bekerja di atas jam kerja normal sebanyak 11,23 juta atau 63,26 persen. Sedangkan sisanya masih ada sekitar 6,5

juta atau 37,74 persen merupakan setengah penganggur atau bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Masih besarnya jumlah setengah penganggur diduga karena beberapa hal seperti : lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai yang diinginkannya masyarakat. Jika demikian kondisinya, maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. Rata-rata jumlah jam kerja menurut pendidikan yang disajikan pada Gambar 3.3 menunjukkan bahwa data pada pendidikan menengah kejuruan lebih tinggi dibandingkan data untuk pendidikan lainnya.

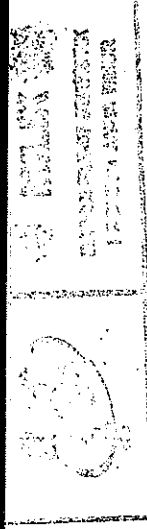
Tabel 3.3. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Jawa Timur, 2004-2005

Jumlah Jam Kerja (1)	2004			2005		
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)	Laki-Laki (5)	Perempuan (6)	Jumlah (7)
0 *)	2,75	3,78	3,12	2,18	2,77	2,40
1-9	1,69	3,39	2,30	1,09	3,84	2,12
10-24	13,64	25,35	17,85	11,43	25,43	16,67
25-34	15,34	18,86	16,61	14,80	16,78	15,54
35-44	26,47	21,38	24,64	26,03	22,22	24,60
45-59	31,98	17,89	26,91	36,50	19,68	30,20
60+	8,13	9,35	8,57	7,97	9,29	8,46
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10.931.733	6.443.222	17.374.955	11.102.082	6.644.320	17.746.402

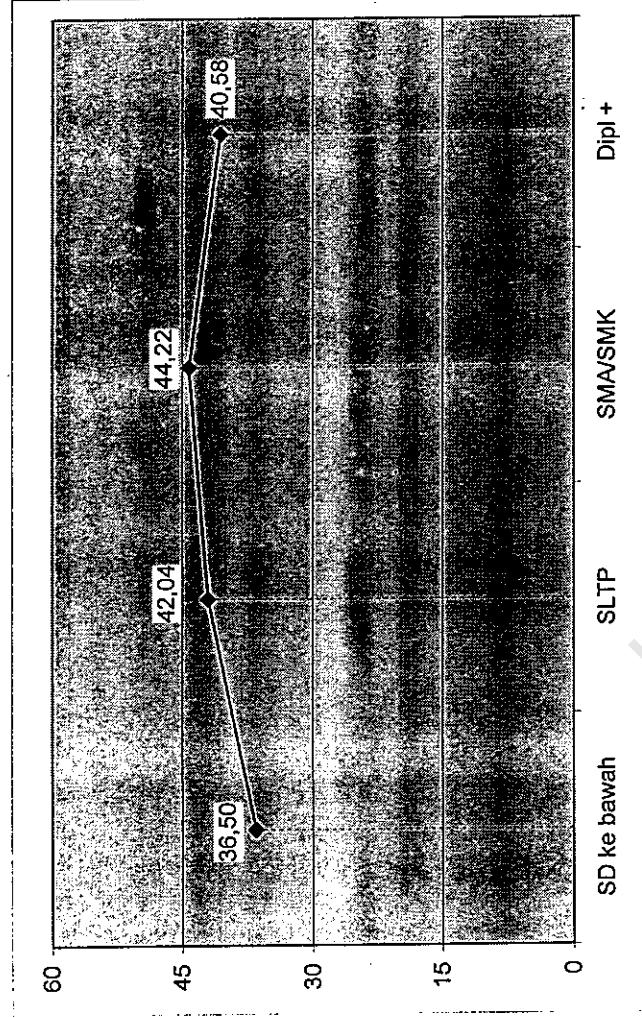
Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas 2004 – 2005 (data diolah)

Catatan: *) penduduk yang sementara tidak bekerja

Teori Human Capital menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja. Pernyataan tersebut tidak dapat dijelaskan dari gambar 3.3, karena nampaknya rata-rata jumlah jam kerja pada mereka yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas) cenderung menurun. Hal ini diduga karena **pertama**, lapangan kerja khususnya sektor modern sangat terbatas jumlahnya, sehingga tenaga kerja terdidik yang berjumlah besar dan muncul dalam waktu bersamaan sering tidak dapat ditampung oleh lapangan kerja yang tersedia di sektor tersebut. **Kedua**, kenyataan umum menyatakan bahwa lulusan pendidikan belum siap untuk bekerja sesuai tuntutan lapangan kerja. Oleh karena itu, banyak usaha industri yang masih harus melatih tenaga kerja tersebut dalam waktu yang relatif lama agar mereka dapat bekerja dengan baik. **Ketiga**, asumsi bahwa pendidikan formal mampu menyediakan tenaga kerja trampil dan mampu bekerja mungkin tidak sepenuhnya benar.



Gambar 3.3. Rata-rata Jam Kerja Seminggu menurut Tingkat Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2005



Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas 2005 (data diolah)

LEPUSIAKKAAN
 BADAN PUSAT STATISTIK
 PROPINSI JAWA TIMUR
 Tgl. Terima : 30 Januari 2007
 No. Induk : 10.0107.0101-C1
 Klasifikasi : 4305.35
 Kode Wilayah : 35060

BAB IV JUMLAH PENGANGGURAN

Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan Pemerintah dalam pembangunan adalah besaran data penganggur (Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT). Secara umum konsep pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengangguran penuh (pengangguran terbuka) dan pengangguran tidak penuh. Namun demikian dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai pengangguran penuh/pengangguran terbuka beserta karakteristiknya.

4.1. Jumlah Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran penuh merupakan angka yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Dari hasil pengolahan data ketenagakerjaan tahun 2005, angka TPT di Jawa Timur mencapai 8,51 persen atau setiap 100 orang angkatan kerja terdapat 8 orang penganggur. Dibandingkan tahun 2004 angka TPT mengalami peningkatan 1 persen atau setiap tahun jumlah penganggur bertambah 1 orang untuk setiap 100 orang angkatan kerja.

Tabel 4.1. Distribusi Kab/Kota Menurut TPAK dan TPT Tahun 2005

TPAK	TPT	
	< Propinsi	> Propinsi
< Propinsi	Lumajang, Jember, Prob, Bojonegoro, Gresik, Sampang	Sidoarjo, Mjkt, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Kota Kediri, Blitar, Malang, Prob. Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Sby, Batu
> Propinsi	Pacitan, Tl.Agung, Blitar, Kediri, Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Magetan, Lamongan, Pamekasan, Sumenep.	Ponorogo, Trenggalek, Bangkalan

Sumber : BPS Jawa Timur, Sakernas 2004 – 2005 (data diolah)

Jika diamati sebaran kab/kota berdasarkan angka TPT dan TPAK seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. Seluruh Kab/Kota terbagi dalam 4 (empat) kelompok.

Dari empat kelompok tersebut, yang perlu mendapatkan perhatian adalah kab/kota yang masuk dalam kelompok II, yaitu kab/kota yang TPAK nya lebih kecil dari propinsi namun mempunyai angka TPT lebih besar dari propinsi. Umumnya untuk kelompok tersebut terjadi pada wilayah kota. Namun dari hasil eksplorasi data, ada beberapa kabupaten yang masuk dalam kelompok II, untuk itu perlu adanya kajian mendalam terhadap kondisi tersebut.

4.2. Jumlah Penganggur menurut Pendidikan

Karakteristik penganggur menurut pendidikan menggambarkan kondisi yang berbeda dengan keadaan di negara-negara maju. Pada negara berkembang umumnya pengangguran banyak terjadi pada penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas), sebaliknya pada negara maju pengangguran banyak terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah, semakin tinggi pendidikan orang semakin rendah tingkat penganggurannya (Borjas, 1996: 436).

Tabel 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Jawa Timur, 2004-2005

Tingkat Pendidikan	2004		2005		
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)	Perempuan (6)	Jumlah (7)
SLTP Ke Bawah	4,88	7,83	6,04	5,43	7,50
SLTA/SMK	12,67	20,52	15,07	14,73	26,71
D1 Ke atas	5,81	13,67	8,77	6,24	13,48
Jumlah	6,39	9,82	7,69	7,23	10,59
	745.947	701.316	1.447.263	798.867	704.036

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas 2004 – 2005 (data diolah)

Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa TPT pada pendidikan rendah (SLTP ke bawah) lebih kecil dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kelompok penduduk yang berpendidikan rendah umumnya berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah (miskin), sehingga mereka tidak mungkin bertahan hidup tanpa ada pekerjaan/pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Umumnya jenis pekerjaan mereka tidak tetap atau merupakan pekerjaan informal. Sebaliknya mereka yang berpendidikan tinggi, umumnya berasal dari keluarga "mampu" yang dapat menggantungkan kebutuhan hidupnya dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Mereka lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang dimatarkannya.

TPT Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Tahun 2004-2005

Kabupaten/Kota	TPT	
	2004	2005
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Pacitan	4,09	5,12
2 Ponorogo	6,67	8,71
3 Trenggalek	6,37	8,91
4 Tulungagung	8,67	7,43
5 Blitar	6,53	6,59
6 Kediri	7,31	8,50
7 Malang	7,82	7,66
8 Lumajang	6,70	6,94
9 Jember	7,38	6,70
10 Banyuwangi	7,41	7,16
11 Bondowoso	4,52	4,93
12 Situbondo	6,23	6,60
13 Probolinggo	6,78	5,97
14 Pasuruan	7,90	7,62
15 Sidoarjo	8,98	12,63
16 Mojokerto	8,81	8,54
17 Jombang	10,72	12,44
18 Nganjuk	7,92	8,55
19 Madiun	10,20	11,86
20 Magetan	6,63	4,34
21 Ngawi	5,53	9,64
22 Bojonegoro	8,56	7,98
23 Tuban	6,67	9,26
24 Lamongan	6,76	7,06
25 Gresik	10,72	6,67
26 Bangkalan	11,54	11,60
27 Sampang	5,29	5,28
28 Pamekasan	4,33	7,21
29 Sumenep	2,67	5,68
Kota		
71 Kediri	11,25	13,38
72 Blitar	10,58	15,17
73 Malang	11,73	14,71
74 Probolinggo	10,17	14,02
75 Pasuruan	11,30	15,11
76 Mojokerto	13,45	15,73
77 Madiun	12,56	17,61
78 Surabaya	9,40	11,15
79 Batu	8,00	9,01
Jawa Timur	7,69	8,51

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas 2004 dan 2005 (Data Diolah)